



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



**SAMBUTAN/PENGARAHAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

**PADA MUSRENBANG RKPD
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2017**

Disampaikan oleh:
MENTERI DALAM NEGERI

TJAHJO KUMOLO

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Yogyakarta, 7 Maret 2016



ARTI PENTING FORUM MUSRENBANG RKPD TAHUN 2017





KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI RKPD

Substansial

Prog & keg dan pemanfaatan keuda dlm upaya peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat & pembangunan di daerah

Formal

- menjadi landasan penyusunan kebijakan penganggaran sesuai dgn UU 17/2003 ttg Keuangan Negara
- Setelah dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan, menjadi landasan penyusunan R-APBD Tahun 2017
- DPRD, KDH, Kepala PD & seluruh pemangku kepentingan, wajib menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta mengendalikan & mengawasi pelaksanaannya

Operasional

- memuat arahan utk peningkatan kinerja pemda yg menjadi tanggung jawab Kepala PD dlm melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban masing-masing.
- Penjabaran lebih lanjut RKPD kedalam Renja-PD harus mengutamakan pd kepentingan publik, agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemda dalam memenuhi kebutuhan layanan dasar & mendorong peningkatan daya saing daerah

Faktual

instrumen evaluasi untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat RKPD memuat tolok ukur kinerja kepala daerah dalam merealisasikan program sesuai dengan visi dan misi KDH

Pasal 263 ayat (4) UU 23/2014
ttg Pemda
"RKPD merupakan penjabaran
dari RPJMD"

memuat

rancangan kerangka ekonomi
dan prioritas pembangunan
Daerah, serta rencana kerja dan
pendanaan untuk jangka waktu
1 (satu) tahun"

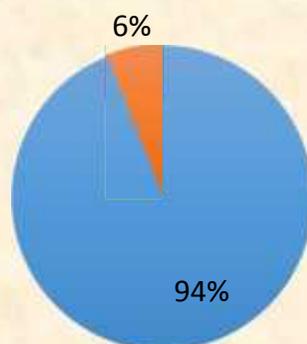


KEMENTERIAN DALAM NEGERI



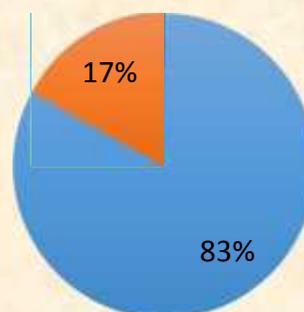
PENETAPAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

RPJPD PROVINSI



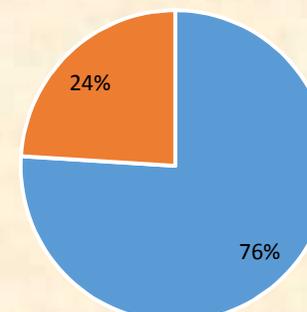
■ sudah ■ belum

RPJMD PROVINSI



■ sudah ■ belum

RKPD PROVINSI



■ Tepat Waktu ■ Terlambat

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



RPJPD

RPJMD = TEPAT WAKTU

RKPD



PENYELARASAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2017

RPJMD

mengurangi tingkat kemiskinan & pengangguran melalui peningkatan kualitas SDM, pengembangan teknologi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, sesuai dgn kondisi, potensi, serta permasalahan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

3 Dimensi Pembangunan dan NAWACITA JOKOWI-JK RPJMN 2015-2019

Pembangunan manusia

peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan; tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta mendukung pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air serta semangat bela Negara

Pembangunan sektor unggulan

upaya mendukung terwujudnya kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri

Pemerataan pembangunan antarwilayah

- peningkatan pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antarwilayah, antardesa dan pinggiran serta antarkawasan
- mengurangi kesenjangan pembangunan dimasing-masing wilayah



Prioritas Pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017

- Mengoptimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Diarahkan untuk mengatasi permasalahan terutama terkait dengan upaya mengoptimalkan implementasi kebijakan pembangunan lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan multidimensi.
- Isu-isu strategis yang harus diperhatikan :
 1. Pengembangan pariwisata
 2. Pelestarian budaya
 3. Pengembangan ekonomi kerakyatan
 4. Mewujudkan *good governance* melalui (*e-planning* dan *e-Budgeting*)



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



HAL YANG PERLU MENDAPATKAN PENAJAMAN DAN PERHATIAN PEMERINTAH DAERAH

1. Sasaran Program dan Kegiatan untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan

mendukung kegiatan reformasi agraria untuk pengendalian pemanfaatan lahan pertanian, pendistribusian bibit & pupuk, peningkatan biaya operasi & pemeliharaan irigasi dlm upaya peningkatan produktifitas pertanian dan nilai tambah petani untuk hidup layak dan lebih sejahtera

2. Sasaran Program dan Kegiatan untuk Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Maritim Yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional

mendukung penguatan konektifitas laut dan industri padat karya, pemberantasan illegal fishing dan pasar gelap ikan, peningkatan konservasi dan pemanfaatan budidaya laut, penguatan kapasitas SDM bidang kelautan, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah turut menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim.

3. Sasaran Program dan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Alam

- mendukung perlindungan dan konservasi sumber daya alam, serta rehabilitasi hutan dan lahan kritis agar kita dapat mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- turut serta melestarikan sumber kehidupan bagi generasi dimasa yang akan datang



Lanjutan

4. Sasaran Program dan Kegiatan Investasi

- mendukung program modernisasi pasar tradisional yang telah ada dan pembangunan pasar tradisional serta peningkatan percepatan penyelesaian perizinan melalui PTSP dengan efisiensi menjadi maksimal 15 (limabelas) hari.
- agar kita mampu bersaing dengan negara tetangga dalam penyelesaian perizinan secara cepat, tepat, mudah dan murah bagi para investor yang akan memulai atau perluasan usaha.
- dengan kemudahan pelayanan perizinan, akan meraih peluang investasi dari forum kerjasama Masyarakat Ekonomi Asean, terutama dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.
- meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional, sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

5. Sasaran Program dan Kegiatan energi dan ketenagalistrikan

mendukung optimalisasi pemanfaatan gas sebagai sumber daya energi, penguatan infrastruktur energi, mengatasi kelangkaan listrik, dan pengembangan teknologi hemat energi



6. Sasaran Program dan Kegiatan Pariwisata Daerah

Lanjutan

- mendukung peningkatan pengelolaan potensi kekayaan alam dan keanekaragaman budaya, penciptaan nilai tambah sektor industri dengan muatan IPTEK, keterampilan, keahlian dan SDM yang unggul
- mendukung pencapaian target kunjungan wisatawan secara nasional.
- pembangunan bidang pariwisata sangat efektif membuka kesempatan kerja menekan angka pengangguran.
- tersedianya SDM yang unggul, dan penerapan teknologi tepat guna kualitas berbagai jenis hasil industri semakin baik yang pada akhirnya mendorong peningkatan pemerataan pendapatan dan kemampuan daya beli masyarakat

7. Sasaran Program dan Kegiatan Infrastruktur

- mendukung penguatan infrastruktur dibidang perhubungan dan maritim, energi, pariwisata, dan kedaulatan pangan.
- tersedianya jaringan infrastruktur dengan berbagai moda transportasi yang mengedepankan pelayanan cepat, tepat, murah dan aman, akan mendorong efisiensi dan efektifitas kelancaran arus orang dan distribusi barang serta jasa yang dapat menekan ekonomi biaya tinggi dan menekan angka inflasi.



MENCIPTAKAN SITUASI DAN KONDISI KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN YANG KONDUSIF

permasalahan

- meningkatnya aksi terorisme, perampokan, penyebarluasan ideologi yang bertentangan dgn UUD 45 & Pancasila,
- maraknya aksi unjuk rasa dan konflik sosial
- meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan & anak serta trafficking,
- meningkatnya peredaran & penggunaan miras, narkoba, psikotropika yang telah menelan korban jiwa,

hasil

- terjaminnya keamanan, ketentraman & ketertiban
- terselenggaranya pemilihan umum kepala daerah serentak pada tanggal 9 desember 2015 secara damai

pencegahan

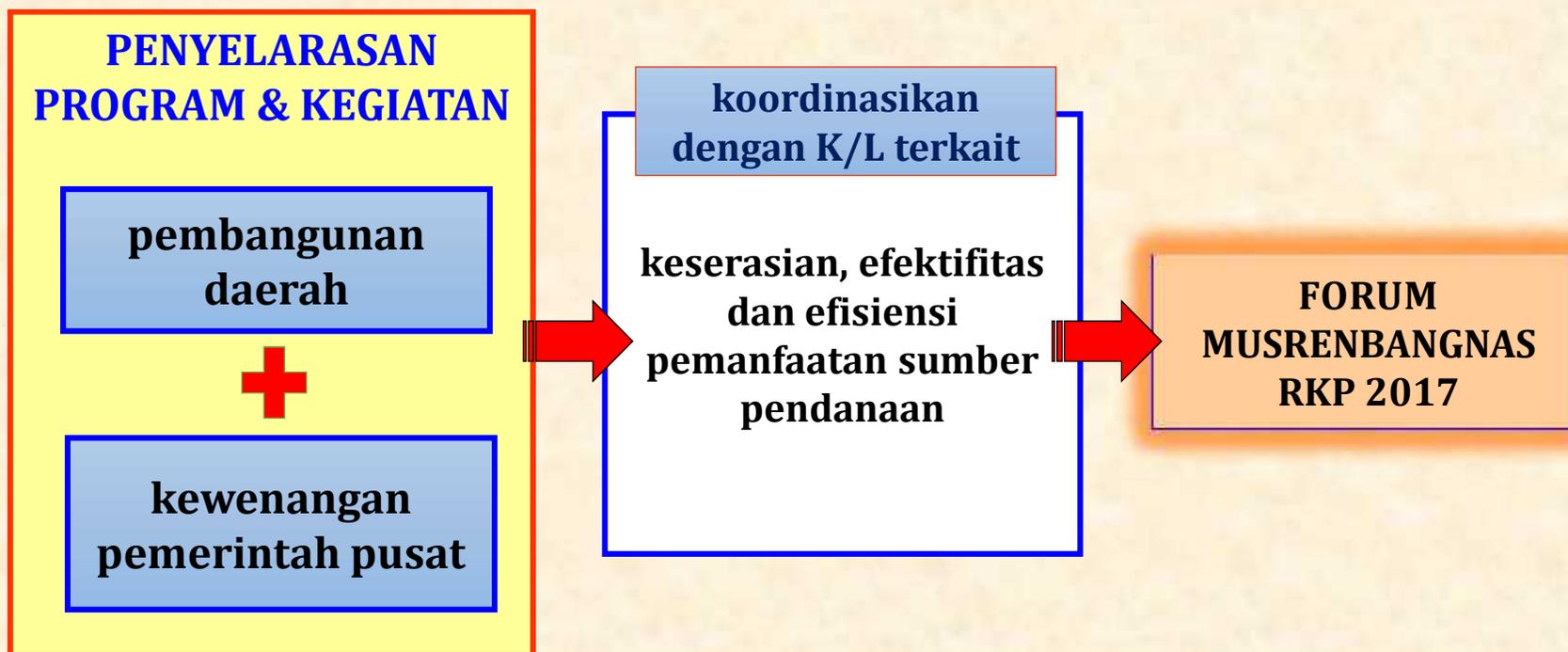
- tingkatkan koordinasi FORKOMPIMDA, seluruh jajaran tingkat provinsi sampai tingkat kelurahan dan desa
- cegah dan tangkal gangguan keamanan sejak dini untuk menciptakan situasi yang aman, tentram dan tertib

sasaran program dan kegiatan

- menjamin terciptanya kepastian & penegakan hukum, keamanan dan ketertiban,
- peningkatan pendidikan politik, demokrasi bagi setiap warga masyarakat

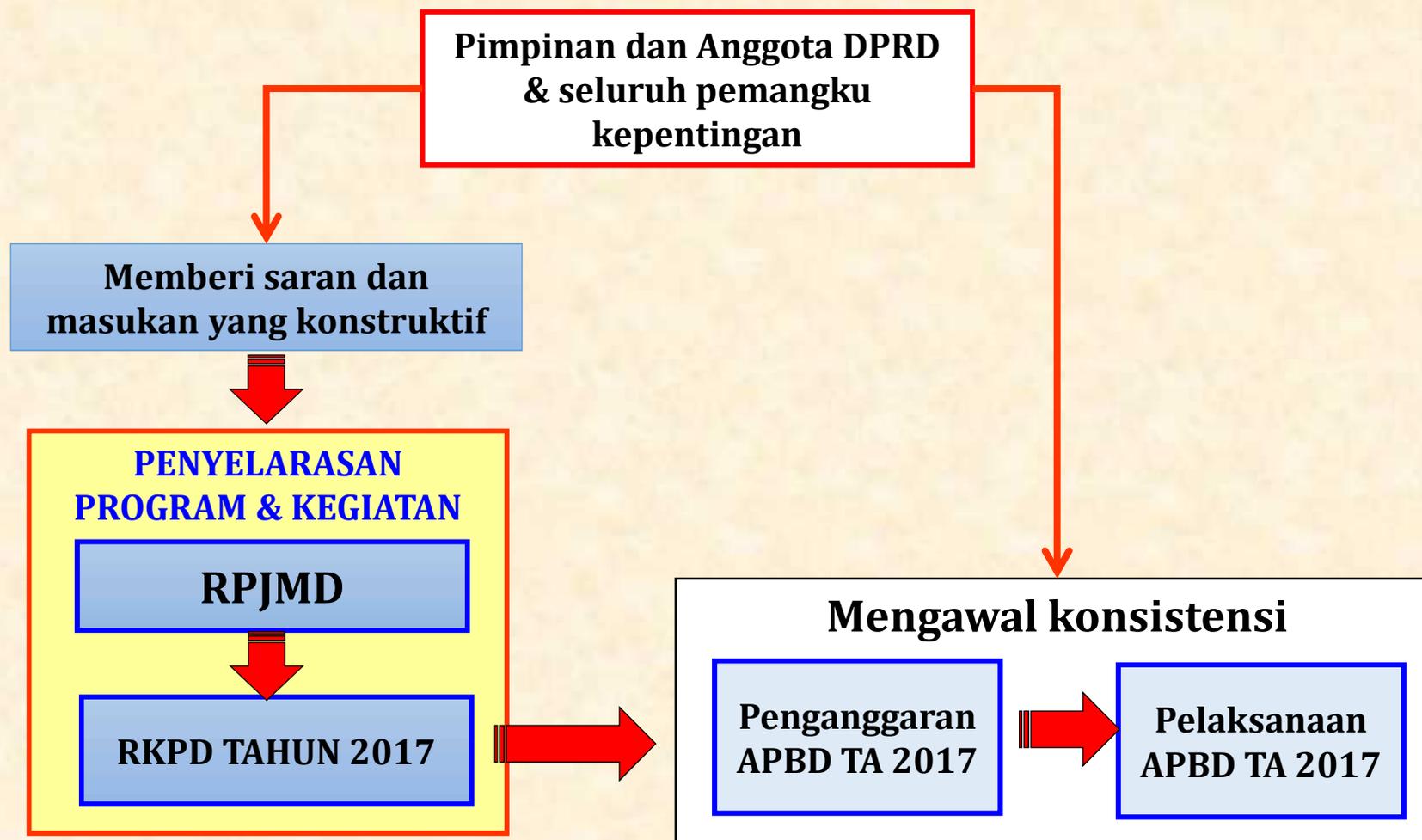


SINERGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 MENDUKUNG AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL





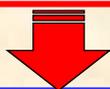
PENYELARASAN RKPd TAHUN 2017 DENGAN RPJMD DAN KONSISTENSI PENGANGGARAN & PELAKSANAAN APBD TAHUN 2017





UPAYA MEWUJUDKAN VISI PEMBANGUNAN TAHUN 2015-2019

**SELURUH UNSUR
PENYELENGGARA PEMDA**



**koordinasikan, sinergikan
program & kegiatan RKPD
berdasarkan RPJMD & RPJMN**



**Dukung agenda prioritas dan
pencapaian sasaran
pembangunan nasional
Tahun 2017
(Dalam RPJMN 2015-2019)**



**Mewujudkan
VISI PEMBANGUNAN INDONESIA
TAHUN 2015-2019**
*"Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri,
Dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong"*



**Bangun komitmen yang tinggi dan
bekerjasama melibatkan seluruh
kelompok & lapisan masyarakat
dalam membangun daerah**



Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

- *Penyusunan dokumen Perencanaan pembangunan daerah berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;*
- *Periodesasi Perda tentang RPJMD pasca pemilukada adalah “Tahun 2016-2021”;*
- *Bagi daerah yang telah melaksanakan Pemilukada Tahun 2015, penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2017 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, serta memperhatikan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih;*
- *Daerah agar mempercepat pengalihan personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) untuk mengefektifkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai kewenangan.*
- *Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD Tahun 2017. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA-PD, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017.*



TERIMA KASIH

